

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Diaspora dan migrasi adalah sebuah fenomena yang banyak dijumpai dalam perjalanan sejarah bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia.¹ Salah satu fenomena yang paling menonjol dalam sejarah diaspora di kepulauan Indonesia adalah diaspora suku bangsa Bugis sejak abad ke-17. Orang-orang Bugis membangun koloni-koloni di Kalimantan bagian timur, di Kalimantan bagian tenggara, Pontianak, Semenanjung Melayu, khususnya di barat daya Johor, dan di wilayah lainnya. Dari beberapa koloni tersebut, orang Bugis mengembangkan pelayaran dan perdagangan, perikanan, pertanian dan pembukaan lahan perkebunan. Kemampuan menyesuaikan diri merupakan modal terbesar yang memungkinkan orang Bugis dapat bertahan di mana-mana selama berabad-abad. Menariknya, walau mereka terus menyesuaikan

¹Lihat Singgih Tri Sulistiyono, “Diaspora dan Proses Formasi ‘Keindonesiaan’: Sebuah Pengantar Diskusi” (Makalah dipresentasikan pada Konferensi Nasional Sejarah IX, Jakarta, 5 – 7 Juli 2011), hlm.8; lihat juga Jana Evans Braziel & Anita Mannur, “Nation, Migration and Globalization: Point of Contention in Diaspora Studies”, dalam Jana Evans Braziel & Anita Mannur (ed), *Theorizing Diaspora* (Germany: Blackwel Publishing, 2003), hlm.1; Thomas Faist, “Diaspora and Trans Nasionalism, What kind of dance partner?” dalam Rainer Baubock & Thomas Faist (ed), *Diaspora and Transnationalism, Concept, Theories and Methods* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), hlm. 9-10; Bandingkan dengan Nicholas Mirzoeff, “The Multiple View Point: Diasporic Visual Culture” dalam Nicholas Mirzoeff, *Diaspora and Visual Culture, Representing African and Jews* (London: Routledge, 1999), hlm.8-10.

diri dengan keadaan sekitarnya, orang Bugis tetap mampu mempertahankan identitas 'ke-Bugis-an' mereka.²

Kajian tentang diaspora suku Bugis ke daerah lain yang mulai berlangsung sekitar abad ke-17 marak dikaji sejarawan dan peneliti dengan tema beragam. Umumnya mereka menitikberatkan pada tinjauan diaspora politik dan latar belakangnya yang melibatkan para bangsawan atau golongan raja. Kemudian membahas bagaimana adaptasi orang Bugis untuk *survival* di daerah lain, serta dampak diaspora bagi perkembangan suatu kawasan.³ Karya-karya tersebut memang bervariasi, tetapi kajiannya cenderung hanya membahas tentang diaspora Bugis dari abad ke-17 sampai abad ke-18 dan fokusnya hanya di daerah-daerah tertentu seperti di Semenanjung Malaya, daerah pesisir Jawa dan Sumatera. Sementara itu, diaspora orang Bugis di wilayah Borneo (Kalimantan) bagian selatan dan timur khususnya di wilayah Tanah Bumbu, seakan 'belum tersentuh'. Demikian halnya dalam kerangka temporal, permasalahan kontinuitas diaspora Bugis pada abad ke-19 dan ke-20,

²Sarkawi B. Husain, "Diaspora Orang-Orang Bugis Makassar di Surabaya, Abad XV-XXI" (Makalah dipresentasikan pada Konferensi Nasional Sejarah IX, Jakarta, 5-7 Juli 2011), hlm. 1.

³Diantara karya tersebut adalah Jacqueline Linneton, "Passompe' Ugi': Bugis Migrants and Wanderers", *Archipel*, vol. 10, 1973; Kathryn Gray Anderson, "The Open Door: Early Modern Wajorese Statecraft and Diaspora" (Disertasi Pada University of Hawaii, Agustus 2003); Leonard Y. Andaya, "The Bugis Makassar Diasporas", *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society* (JMBRAS), vol. 68, part I; Gene Ammarel, "Bugis Migration And Modes to Adaptation to Local Situation", *Ethnology*, vol.41, no. 1, 2002; Jan van der Putten, "A Malay of Bugis Ancestry: Haji Ibrahim's Strategies of Survival", *Journal of Southeast Asian Studies* (JSAS), vol. 32 (3), (The National University of Singapore, Oktober 2001).

sangat jarang dikaji oleh peneliti. Selain itu pembahasan tentang dampak diaspora dan ekspansi perdagangan orang Bugis (*expansion of Bugis trade*) juga masih luput dari perhatian. Berdasarkan pada kondisi itu, kajian ini mencoba menguraikan diaspora dan migrasi suku Bugis di daerah migran yaitu wilayah Tanah Bumbu, Karesidenan Borneo bagian Selatan dan Timur,⁴ tahun 1842-1942.

Latar belakang diaspora awal orang-orang Bugis ke daerah lain di Nusantara hingga ke Semenanjung Malaya serta wilayah Asia Tenggara lainnya adalah adanya semangat untuk merantau (*massompe*). Orang-orang Bugis selalu berupaya mencari tempat yang dianggap layak bagi dirinya untuk tinggal, bekerja, bermasyarakat dan lain-lain. Selama hal tersebut belum dicapai, perantauan tidak akan pernah berakhir. Perantauan orang Bugis ini juga dimotivasi budaya *siri* yang menjadi pandangan hidup orang Bugis.⁵ Dinamika diaspora Bugis ini turut diwarnai peristiwa jatuhnya

⁴Penulisan Residensi Borneo bagian Selatan dan Timur dalam tesis ini, merujuk pada wilayah administratif, sedangkan wilayah Tanah Bumbu merujuk pada daerah *landschap* atau bentang alam. Nama *landschap* Tanah Bumbu muncul sejak abad ke-17, pada awalnya merupakan *tanah lungguh* Pangeran Dipati Tuha, keturunan bangsawan Banjar. Sementara pemakaian nama Kalimantan bagian tenggara, bukan wilayah administratif tetapi hanya untuk memperjelas daerah atau teritorial yang dimaksud dalam penulisan ini. Lihat M. Idwar Saleh, *et.al.*, *Sejarah Daerah Tematis, Zaman Kebangkitan Nasional (1900-1942) di Kalimantan Selatan* (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat, 1977/1978), hlm. 9.

⁵Sarkawi B. Husain, *op.cit*, hlm.2. Merantau bagi orang Bugis dianggap menjadi jalan memperbaiki hidup dan meningkatkan harkat dan martabat, baik harga diri maupun kelompok. Lihat Andi Zaenal Abidin, *Persepsi Orang Bugis, Makasar Tentang Hukum, Negara dan Dunia Luar* (Bandung: Alumni, 1983), hlm.31-35. Karena itulah diaspora Bugis lebih berhasil, disebabkan oleh situasi historis dan keunikan orang-orang Bugis untuk melakukan pembaharuan. Orang Bugis menjadi kelompok diaspora yang mapan di dunia Melayu dan pantai timur Sumatra. Lihat juga Singgih Tri Sulistiyono, *op.cit*, hlm.9.

Makassar ke tangan Belanda pada tahun 1667.⁶ Migrasi orang-orang Bugis meningkat di tahun-tahun berikutnya ke berbagai wilayah di Asia Tenggara. Penyebab gerakan migrasi ini adalah ‘pembatasan komersial’ ketat yang dipaksakan Belanda terhadap perdagangan Makassar. Hasil dari arus perpindahan penduduk dari Sulawesi Selatan, terdapat koloni-koloni orang Bugis di Kalimantan Timur, dekat Samarinda dan Pasir; di tenggara Kalimantan, Pontianak, Semenanjung Melayu, khususnya di barat daya Johor, dan di wilayah lainnya di Nusantara.⁷

Kesinambungan diaspora orang Bugis yang berlangsung hingga abad ke-19 dan ke-20, terpelihara berkat peranan pelayaran dan perdagangan Bugis. Korelasi antara pelayaran dan perdagangan dengan arus migrasi orang-orang Bugis, terjadi di hampir semua daerah koloni Bugis di wilayah Hindia Belanda dan Semenanjung Melayu. Sebagaimana fenomena diaspora orang Bugis di wilayah Karesidenan Borneo bagian Selatan dan Timur, khususnya pada tahun 1842 hingga tahun 1942-an.

⁶Pada tahun 1667 ditandatangani perjanjian Bongaya antara Kesultanan Gowa yang diwakili Sultan Hasanuddin dan pihak Hindia Belanda yang diwakili Laksamana Cornelis Speelman. Walaupun disebut perjanjian perdamaian, isi sebenarnya adalah deklarasi kekalahan Gowa dari VOC (Kompeni) serta pengesahan monopoli oleh VOC untuk perdagangan sejumlah barang di Pelabuhan Makassar yang dikuasai Gowa. Lihat Jacqueline Linneton, *op.cit*, hlm.175.

⁷ Lihat Jacqueline Linneton, *op.cit*, hlm.175-176; Rasyid Asba, *Kopra Makassar, Perebutan Pusat dan Daerah, Kajian Sejarah, Ekonomi, Politik Regional di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor, 2007), hlm.75; bandingkan dengan Horst H. Liebner, “Tradisi Kebaharian di Sulawesi Selatan: Tinjauan Sejarah Perkapalan dan Pelayaran” dalam Heather Sutherland, *et.al.* (ed) *Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan* (Yogyakarta: Ombak, 2004), hlm.78-81.

Dampak dari diaspora Bugis sejak abad ke-18 hingga abad ke-20 terwujud pada terbentuknya pemerintahan Bugis atau *to-Ugi'*⁸ Pagatan tahun 1735 yang berkembang sejak tahun 1842-an. Pemukiman yang dibangun orang-orang Bugis tahun 1735 hingga tahun 1800 menjadi “embrio” dari perkembangan jaringan diaspora dan perdagangan perahu layar Bugis antar pulau pada tahun 1850-an. Selanjutnya, tradisi maritim *to-Ugi'* seperti *pappagattang*, *mappanretasi'* dan “industri” pembuatan perahu Bugis tahun 1920-an. Kemudian pembukaan kampung-kampung nelayan Bugis di wilayah Pagatan tahun 1920, strategi adaptasi ekonomi *to-Ugi'* serta terbentuknya jaringan perikanan *pongawa* Bugis tahun 1930. Dalam perkembangannya hingga abad ke-20, kerajaan ini menjadi “homebase” migran Bugis di Kalimantan bagian tenggara dan timur. Dalam bidang ekonomi, mereka mengembangkan bidang perdagangan, pertanian, perkebunan dan perikanan.⁹

Fakta yang paling signifikan yang mendukung terjadinya migrasi Bugis ke daerah lain dalam empat dekade pertama abad ke-20 adalah “ekspor” padi, dan komoditas karet dan tanaman lainnya seperti kopra. Sebagian besar migran Bugis ke

⁸ Istilah *to-Ugi'* berasal dari Bahasa Bugis yakni *to*: orang, *Ugi'*; Bugis, sehingga *to-Ugi'* bisa diartikan dengan *orang Bugis*. Penamaan ini dipakai orang Bugis di Tanah Bumbu untuk mengidentifikasi dirinya di tanah rantau sehingga merasa berbeda dengan suku lainnya. Wujud identitas *to-Ugi'* di Tanah Bumbu memiliki perbedaan dengan identitas Bugis di wilayah asalnya yakni di Wajo, Sulawesi Selatan.

⁹ Lihat Patrice Levang, *Ayo Ke Tanah Sabrang: Transmigrasi Di Indonesia*, terjemahan Sri Ambar Wahyuni Prayoga (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010), hlm.165; J. Thomas Lindbland, *Between Dayak and Dutch, The Economic History of Southeast Kalimantan 1880-1942* (Leiden: KITLV Press, 1988), hlm.10-13 & 179.

Kalimantan dan Semenanjung Malaya terlibat dalam penanaman karet atau lebih sering dalam penanaman kelapa untuk kopra. Tanaman perkebunan ini cocok dan hampir sama dengan produksi pertanian di Sulawesi Selatan. Selain itu, dalam bidang kelautan orang Bugis yang ber-diaspora ke wilayah Tanah Bumbu juga membawa budaya maritim-nya.¹⁰

Arus migrasi di wilayah itu makin berkembang seiring dengan dilaluinya jalur Karesidenan Borneo bagian Selatan dan Timur (Pelabuhan Stagen, Kotabaru) oleh armada *Netherlands Indies Steams Navigation* (NISN) pada tahun 1888 dan armada *Koninklijk Paketvaart Maatshappij* (KPM) milik pemerintah Hindia Belanda tahun 1900-an. Secara tidak langsung, keberadaan armada NISN maupun KPM memang mengakibatkan makin menurunnya jumlah dan kapasitas perahu yang singgah di pelabuhan-pelabuhan utama Nusantara, dengan perkecualian pelabuhan Makassar. Meskipun demikian, keberadaan armada KPM tidak serta merta mematikan peranan perahu layar orang Bugis. Pelayaran perahu rakyat ini malah menjadi salah satu armada transportasi pembantu atau *feeder vessels*.¹¹

¹⁰ *Ibid.* Lihat juga Tim Penulis, *Upacara Adat Mappanre Tasi' di Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan* (Banjarmasin: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 2008), hlm.10; lihat juga Sutinah Made, *et.al*, "Pengaruh Migrasi Musiman Wanita Nelayan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga dan Pendidikan Anak" (Laporan Penelitian pada Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan Universitas Hasanuddin, 2011), hlm.ii.

¹¹ Singgih Tri Sulistiyono, "The Java Sea Network: Pattern in The Development of Interregional Shipping and Trade in the Process of National Economic Integration In Indonesia 1870s- 1970s" (Disertasi pada Universitas Leiden, 2003), hlm.199; lihat juga Endang Susilowati, "Pasang Surut Pelayaran Perahu Rakyat di Pelabuhan Banjarmasin, Tahun 1880-1990" (Disertasi pada Universitas Indonesia, 2004), hlm.6.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tesis ini mengkaji dua permasalahan utama. Pertama, apakah hubungan diaspora orang-orang Bugis dengan terbentuknya jaringan diaspora dan “daerah otonom” Bugis di wilayah Tanah Bumbu, Karesidenan Borneo bagian Selatan dan Timur dalam kurun waktu tahun 1842-1942. Permasalahan ini berkaitan dengan latar belakang diaspora suku bangsa Bugis ke Borneo (Kalimantan), “embrio” terbentuknya komunitas Bugis hingga terbentuknya kesatuan masyarakat Bugis yang lebih besar atau “daerah otonom” yakni kerajaan Bugis Pagatan di *landskap*/wilayah Tanah Bumbu. Kemudian permasalahan ini juga berkaitan dengan dinamika Kerajaan Bugis Pagatan (aspek politik, pelayaran dan perdagangan) dalam kurun waktu tahun 1842-1900. Permasalahan kedua, mengapa orang-orang Bugis bisa mempertahankan “kontinuitas” diaspora di wilayah Tanah Bumbu, Karesidenan Borneo bagian Selatan dan Timur sejak tahun 1842 hingga tahun 1942. Dalam hal ini, berhubungan dengan faktor faktor yang menyebabkan “terpeliharanya” diaspora Bugis hingga tahun 1942.

B. Ruang Lingkup

Agar pembahasan mengenai suatu permasalahan dalam ilmu sejarah tidak keluar jalur maka harus diberi batasan-batasan yang menjadikan suatu permasalahan dibahas secara fokus. Batasan-batasan itu dikenal dengan sebutan ruang lingkup. Dalam pembahasan tesis ini terdapat tiga batasan ruang lingkup, yaitu lingkup spasial, temporal dan keilmuan sebagai pedoman dalam pengumpulan sumber dan pembahasan.

1. Lingkup Spasial

Ruang lingkup spasial yaitu batasan tempat/wilayah. Batasan ruang penelitian ini adalah wilayah Karesidenan Borneo bagian Selatan dan Timur atau *Zuider-en Ooster Afdeeling van Borneo*, fokusnya ke wilayah Tanah Bumbu. Sementara itu, penggunaan nama dalam penulisan Borneo bagian Selatan dan Timur merujuk kepada terminologi dalam sumber penelitian. Pemakaian istilah Karesidenan Borneo Bagian Selatan dan Timur dalam tulisan ini, merujuk kepada pembagian wilayah administratif pada masa Hindia Belanda tahun 1898-1942. Wilayah Borneo atau Kalimantan bagian selatan, tenggara dan timur sejak tahun 1898 berdasarkan *staatsblad* 1898 no.178 menjadi wilayah Karesidenan bernama *Zuider en Oosterafdeeling van Borneo* atau Karesidenan Borneo bagian Selatan dan Timur. Sementara pemakaian nama Kalimantan bagian tenggara, bukan wilayah administratif tetapi hanya untuk menunjukkan letak geografis dan memperjelas daerah atau teritorial yang dimaksud dalam penulisan ini.¹²

Wilayah Tanah Bumbu merujuk kepada kesatuan wilayah bentang (alam) atau *landschap* yang beberapa kali berganti status secara administratif. Pada tahun 1849 sampai 1898 menjadi wilayah *onderafdeeling*, kemudian tahun 1898 sampai 1912 menjadi wilayah *afdeeling*. Selanjutnya tahun 1913, kembali menjadi wilayah *onderafdeeling* di bawah wilayah *afdeeling* Banjarmasin. Pada tahun 1930 Tanah Bumbu tetap menjadi wilayah *onderafdeeling*, tetapi digabung dengan *onderafdeeling* Pasir sebagai bagian dari *Afdeeling Zuidoost-kust van Borneo* atau

¹²M. Idwar Saleh, *et.al, loc.cit.*

Afdeeling Pesisir Kalimantan bagian Tenggara. Dengan pertimbangan seringnya perubahan status wilayah tersebut, sehingga nama Tanah Bumbu yang dipakai dalam tulisan ini hanya menggunakan kata wilayah sebagai kesatuan bentang alam atau *landschap*, bukan status daerah secara administratif. Penelitian ini memfokuskan kajiannya kepada diaspora dan dampaknya di wilayah Tanah Bumbu.¹³ Dalam hal ini berhubungan dengan latar belakang sejarah orang-orang Bugis yang membuat mereka dikenal sebagai suku yang berbeda dengan suku lainnya di wilayah Tanah Bumbu. Sementara itu, diaspora yang dimaksud adalah penyebaran, merujuk kepada penduduk Bugis di Sulawesi Selatan yang terpaksa atau terdorong meninggalkan daerahnya ke berbagai daerah di Nusantara hingga ke daerah lain di Asia Tenggara.

2. Lingkup Temporal

Pemilihan ruang lingkup temporal atau pembatasan waktu dalam tesis ini adalah tahun 1842-1942. Dalam kurun waktu tersebut, intensitas migrasi dan diaspora Bugis makin meningkat ke wilayah Tanah Bumbu. Kemudian, sejak tahun 1842-1942 “institusi politik” migran Bugis yakni Kerajaan Bugis Pagatan menemukan “kemapanan” dalam bidang perdagangan dan politik di wilayah Kalimantan bagian tenggara. Selanjutnya, pemilihan kurun waktu yang dimulai pada tahun 1842 adalah berdasarkan munculnya beberapa “peristiwa politik” seperti penyatuan Kerajaan Pagatan dan Kerajaan Kusan dalam “kendali” Kerajaan Bugis Pagatan-Kusan.

¹³Lihat Hidayah, *op.cit.*, hlm.70.; lihat juga Stuart Hall, “Cultural Identity and Diaspora” dalam J Rutherford (ed), *Identity* (London: Lawrence & Wishart, 1990). hlm. 393.

Kemudian konflik antara Suku Bugis “pendatang” yang dipimpin Daeng Manggading di wilayah Batulicin dengan Aji Pati yang dibantu Pangeran Meraja Nata yang mencapai puncaknya di tahun 1844. Beberapa “peristiwa politik” ini menunjukkan bahwa diaspora orang-orang Bugis di wilayah Tanah Bumbu mengalami dinamika sejak tahun 1842-an.

Dalam perkembangannya, pada tahun 1900-an jaringan ekonomi Bugis mengalami perkembangan yakni munculnya jaringan penangkapan ikan dan perdagangan Bugis yang berkembang di sepanjang pesisir yang berbatasan dengan Selat Makassar hingga tahun 1900-an. Kemudian pada awal tahun 1900-an juga mulai diterapkan sistem *handil* dan *huma*, pengelolaan pertanian yang diadopsi dari Suku Banjar. Dalam bidang maritim muncul upacara adat *mappanretasi* pada tahun 1901 yang menjadi ciri khas budaya nelayan Bugis serta munculnya jaringan perdagangan ikan *pongawa* Bugis. Kemudian terdapat tradisi migrasi musiman *pappagattang* serta munculnya “industri” pembuatan perahu di kampung Bugis pesisir Pagatan, Tanah Bumbu tahun 1920-an. Alasan pembatasan sampai tahun 1942 karena berakhirnya masa pemerintahan Hindia Belanda dan mulai masuknya kolonial Jepang di wilayah Nusantara dan Kalimantan pada khususnya. Masuknya kolonial Jepang berpengaruh pada menurunnya intensitas diaspora dan migrasi Bugis ke Kalimantan karena adanya pembatasan pelayaran perahu maupun kapal uap dari wilayah Kalimantan ke Sulawesi.

3. Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan dari tesis ini adalah ilmu sejarah, khususnya Sejarah Maritim. Lebih khusus lagi kajian ini memfokuskan pada sejarah diaspora suku bangsa Bugis di Karesidenan Borneo bagian Selatan dan Timur dan dinamika diaspora *to-Ugi* di wilayah Tanah Bumbu.

C. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa buku yang relevan, yang berisi informasi dan dapat dijadikan acuan dalam menyusun tesis ini. Karya pertama yang dikaji dalam tinjauan pustaka ini adalah disertasi Kathryn Gray Anderson, *The Open Door: Early Modern Wajorese Statecraft and Diaspora*.¹⁴ Disertasi ini membahas hubungan antara Wajo, sebuah pemerintahan konfederasi Bugis di Sulawesi Selatan, dengan kelompok-kelompok migran Wajo di luar daerahnya seperti di Makassar, Sumatera Barat, Selat Malaka, serta Kalimantan Timur dan Tenggara, setelah Perang Makassar (1666-1669). Anderson berpendapat bahwa orang Bugis yang berdiaspora ke daerah lain, berinteraksi dengan ‘daerah pusat’ dalam cara yang mirip dengan ‘konstituen lokal’, dan bahwa daerah tujuan diaspora dapat dilihat sebagai bagian dari negara.

Migran Wajo menurut Anderson memiliki fleksibilitas yang luar biasa dalam beradaptasi dengan kondisi lokal di daerah di mana mereka menetap. Sementara itu, tiap komunitas Bugis yang berkembang di daerah tujuan bisa bekerja sama dan

¹⁴Kathryn Gray Anderson, “The Open Door: Early Modern Wajorese Statecraft and Diaspora” (Disertasi pada University of Hawaii, Agustus 2003), hlm.141-168.

memiliki strategi sehingga bisa membaur. Terutama lewat jalan perkawinan, diplomasi dan peperangan. Berbagai komunitas Bugis di berbagai daerah juga bekerja sama dalam membangun daerah komersial dan saling memberikan bantuan militer. Kerjasama tersebut didukung adanya konsep Bugis yakni *pesse'* dan solidaritas atau simpati. *Pesse'* adalah ikatan emosional yang mengikat migran dengan 'tanah air' nya di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu kunci untuk pemeliharaan hubungan antara pemukim Bugis Wajo di beberapa daerah, adalah hubungan antara perantau Wajo dengan 'tanah air'-nya yang diintensifkan pada awal abad ke-18 ketika penguasa Wajo berusaha untuk memanfaatkan kekuatan militer dan potensi komersial daerah tujuan migran. Upaya ini mencapai puncaknya tahun 1736 ketika salah seorang penguasa Wajo, La Maddukelleng, yang terusir dari Wajo kembali dari Kalimantan Timur ke daerah Wajo di Sulawesi Selatan. La Maddukelleng mendapat dukungan orang Wajo di Makassar dan Sumbawa untuk mengusir Belanda dari Sulawesi Selatan. Walaupun pada akhirnya gagal, tindakan ini mencontohkan "budaya diaspora" orang-orang Wajo, walaupun berada di luar daerahnya tetap menjadi bagian penting dari daerah Wajo yang menjadi *homeland* nya.

Adapun kelebihan dari tulisan K.G. Anderson ini, adalah pembahasannya yang cukup rinci tentang diaspora orang Bugis Wajo pada abad ke-18. Kemudian dari tulisan ini juga dapat dijadikan acuan sekaligus perbandingan dalam "meramu" bahan tulisan untuk penulisan tesis ini, terutama dipaparkan dalam bab 6, tentang diaspora orang-orang Bugis Wajo di Kalimantan bagian timur dan tenggara. Dalam bab ini, dibahas tentang kondisi perekonomian di wilayah pesisir Kalimantan. Kemudian

sejarah awal orang Wajo serta daerah-daerah yang menjadi tujuan diaspora di Kalimantan Timur dan Tenggara, yakni Kutai, Pasir dan Pagatan. Selanjutnya jaringan perdagangan dan penaklukan La Maddukelleng serta pembentukan komunitas di daerah taklukannya di Kalimantan bagian timur dan tenggara.

Karya selanjutnya adalah tulisan Jacqueline Linneton, *Passompe' Ugi': Bugis Migrants and Wanderers*.¹⁵ Dalam tulisannya, J. Linneton menjelaskan tentang *Passompe' Ugi'* (perantau Bugis) dari Sulawesi Selatan yang sejak lama terkenal memiliki jiwa petualang yang berlangsung sejak akhir abad ke- 17. Suku bangsa Bugis bertualang ke seluruh pelosok dunia Melayu dengan berprofesi sebagai pedagang dan penakluk negara-negara kecil. Migrasi orang orang Bugis terjadi setelah jatuhnya Makassar ke pendudukan Belanda pada tahun 1669. Sampai periode ini, gerakan migrasi ke luar daerah Sulawesi Selatan hanya terbatas pada orang-orang Bugis dan Makassar yang terlibat dalam perdagangan. Pedagang ini mungkin adalah pengembara bukan migran, yang menjelajah Nusantara untuk mencari daerah perdagangan di musim-musim tertentu, dan kembali ke Sulawesi hanya beberapa bulan setiap tahun untuk memperbaiki perahu mereka. Menurut J. Linneton, kehadiran bangsa Eropa yang menguasai Makassar di satu sisi, memang makin menancapkan kuku hegemoni-nya. Tetapi di sisi lain, petualang Bugis secara tidak langsung terdorong untuk keluar daerahnya dan efektif mengendalikan beberapa

¹⁵ Jacqueline Linneton, 'Passompe' Ugi': Bugis Migrants and Wanderers'', *Archipel*, vol. 10, tahun 1973, hlm. 173-175.

daerah, seperti Kerajaan Johor, Riau dan Semenanjung Melayu, Kutai di bagian timur Kalimantan, sampai di Selangor, di pantai barat Semenanjung Malaya.

Kelebihan dari tulisan ini adalah penjelasan J. Linneton yang cukup rinci dalam menggambarkan pengaruh Bugis di wilayah pesisir daerah-daerah di Semenanjung Malaya hingga ke Kalimantan yang berada di bawah kontrol orang-orang Bugis dan membawa budayanya yang membentuk sebuah kerajaan Bugis komersial. Perluasan perdagangan orang Bugis dan konflik dalam negeri di Sulawesi Selatan pada akhir abad ke-17 dan ke -18 menyebabkan pedagang Bugis banyak meninggalkan tempat asal mereka. Terutama sub-suku Bugis Wajo, yang menjadi pionir pembentukan koloni di Kalimantan.

Karya selanjutnya adalah tulisan Andi Ima Kesuma, *Migrasi dan Orang Bugis*.¹⁶ Dalam tulisannya Andi Ima Kesuma menjelaskan bahwa hampir di seluruh pesisir pantai di pelosok Nusantara ditemukan komunitas orang Bugis. Mereka berada di daerah tersebut dengan menjadi perantau atau *pasompe*. Budaya *pasompe* jika ditelusuri dalam jejak sejarah yang teramat panjang akan ditemukan fakta yang menyebutkan kalau migrasi secara besar-besaran orang dari Tanah Bugis ke sejumlah wilayah di Nusantara bermula sekitar awal abad ke-17.

Orang Bugis perantauan dikenal sebagai suku yang cepat melakukan adaptasi dengan penduduk asli. Para perantau itu kemudian mengenal adanya istilah tiga ujung atau *tellu cappa* dalam melakukan proses adaptasi dengan penduduk yang didatangi.

¹⁶Andi Ima Kesuma, *Migrasi dan Orang Bugis: Penelusuran Kehadiran Opu Daeng Rilakka Pada Abad XVIII di Johor* (Yogyakarta: Ombak, 2004), hlm 1-20.

Pertama menggunakan *cappa lila* (ujung lidah) atau kemampuan melakukan diplomasi. Jika diplomasi dianggap tidak mempan maka dilakukan langkah kedua *cappa laso* (ujung kemaluan), yakni orang Bugis melakukan proses perkawinan dengan penduduk asli. Kalau pada akhirnya kedua ujung itu tidak mempan, maka ditempuhlah jalan terakhir menggunakan *cappa kawali* (ujung badik), yaitu dengan peperangan.

Andi Ima Kesuma juga menjelaskan, salah seorang Bugis perantauan yang tiba di Johor awal abad ke-17 adalah Opu Daeng Rilakka bersama dengan lima orang putranya yakni Opu Daeng Parani; Opu Daeng Manambung; Opu Daeng Marewa; Opu Daeng Calla serta Opu Daeng Kamase. Kelima satria Bugis ini menurut Andi Ima Kesuma, memberi warna perjalanan pemerintahan di Kesultanan Johor. Daeng Rilakka merupakan turunan kedua Arung Matoa Wajo ke-44, La Oddang Datu Larompong.

Karya ini termasuk salah satu studi mendalam soal migrasi orang Bugis dengan mengambil kasus Bugis asal Wajo di Johor Malaysia. Sejarah migrasi orang Bugis selain karena faktor ekonomi juga karena peperangan. Migrasi keluar Sulawesi Selatan berkaitan erat dengan peperangan akibat rivalitas antar kerajaan memperebutkan hegemoni. Dalam hal ini maka migrasi pada hakikatnya adalah produk perang dan proses sosial. Tradisi *pasompe* telah berlangsung pada kurun waktu tahun 1600-an, bermula dari Perang Makassar melawan VOC. Bangsawan kerajaan yang bersekutu dengan Makassar banyak yang meninggalkan daerahnya. Selain faktor perang, *masompe* dilakukan karena *siri'* serta prinsip menyangkut

kebebasan dan kemerdekaan. Dari karya ini, pola migrasi dan diaspora awal Bugis di wilayah Tanah Bumbu hampir sama dengan yang terjadi di Johor. Konsep yang dipakai Andi Ima Kesuma tentang *passompe* yang menjadi filosofi migrasi Bugis untuk merantau ke Semenanjung Malaya, bisa diterapkan dalam menganalisa migrasi dan diaspora Bugis di wilayah Tanah Bumbu.

Selanjutnya karya Hamid Abdullah, *Dinamika Sosial Emigran Bugis Makassar di Linggi Malaysia*.¹⁷ Dalam tulisannya Hamid Abdullah menjelaskan tentang emigrasi orang Bugis Makassar ke kawasan Linggi, Kerajaan Selangor, Semenanjung Malaya pada tahun 1809. Kawasan itu dahulunya adalah hutan belantara yang belum terjamah oleh tangan manusia. Demikian pula sungainya masih merupakan rawa-rawa yang belum dapat dipergunakan untuk pelayaran sampai akhirnya dibuka oleh orang Bugis. Dalam perkembangannya kawasan Linggi menjadi wilayah yang potensial dalam sektor geografis dan juga menjadi wilayah penting dalam sektor perdagangan dan ekonomi di semenanjung Malaya.

Menurut Hamid Abdullah, *Linggi* berasal dari nama bagian buritan kapal (perahu Bugis) dan nama itu dipakai seterusnya dalam upaya membuka lahan pemukiman yang baru. Daerah Linggi ini pun dianggap sebagai pemukiman harapan. Migrasi Bugis-Makassar ke daerah Linggi terjadi sebagai akibat langsung dari terusirnya mereka dari kesultanan Riau. Pengusiran yang sistematis itu sebagai akibat masuknya pemerintah kolonial Belanda yang berkolaborasi dengan Kesultanan Riau.

¹⁷Hamid Abdullah, “Dinamika Sosial Emigran Bugis Makassar di Linggi, Malaysia”, dalam Mukhlis (ed), *Dinamika Bugis Makassar* (Jakarta: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial-YIIS, 1986), hlm.149-160.

Pada 10 November 1784 disusun perjanjian antara kerajaan Johor dengan pemerintah Belanda yang diberi nama *Tractaat van Altoos Durende, Getrouwe Vriend end Bondgenootschap*. Perjanjian tersebut berisi aturan yang mewajibkan warga Riau asli memegang jabatan di Kesultanan, sehingga berakibat fatal bagi posisi Bugis-Makassar dalam dunia politik Kerajaan Johor.

Pengusiran itu bukan menjadi halangan bagi Bugis-Makassar untuk merebut kembali martabatnya. Mereka kembali mengarungi lautan, menerobos sungai, merambah dan membuka hutan untuk pemukiman baru. Semangat juang mereka tak surut, dan justru tambah bersemangat. Orang Bugis-Makassar “menyulap” kawasan hutan lebat menjadi tanah pertanian yang subur. Sungai Ujong di pinggir hutan Linggi dibersihkan dan dibuka untuk lalu lintas perdagangan. Makin lama pelayaran rakyat melewati alur Sungai Ujong kian ramai dan menjadikan Linggi sebagai salah satu kawasan penting. Pada awal abad ke-19 Linggi menjelma menjadi daerah otonomi yang luas, dan orang Bugis-Makassar yang membuka daerah ini pun telah memiliki struktur pemerintahan lokal tersendiri. Tentunya, prinsip *siri' na pacce* (rasa malu dan solidaritas) yang terus membakar semangat mereka, sehingga tidak jatuh mental ketika terusir dari kesultanan Riau.

Menurut Hamid Abdullah, keterlibatan masyarakat Bugis-Makassar dalam kerajaan-kerajaan di Semenanjung Melayu tampak cukup pelik. Mereka dengan terpaksa ikut terlibat perang, hiruk pikuk dalam memperebutkan kekuasaan dan mahkota kerajaan Riau, Johor, Pahang, Kedah dan Selangor. Aktivitas berupa intrik politik, komplot, skandal adalah peristiwa yang berulang setiap saat, yang kadang

menimbulkan korban keluarga sendiri. Seringkali pula mereka dijebak untuk memihak pada salah satu golongan, sehingga membuat kelompok mereka terpecah-pecah. Akibatnya anak keturunan Bugis-Makassar saling bersitegang karena berbeda keberpihakan.

Konsep tentang migrasi Bugis di kawasan Linggi, Semenanjung Malaya dapat diterapkan dalam membahas tentang migrasi dan diaspora Bugis di Tanah Bumbu. Dalam pembahasan Hamid Abdullah, dijelaskan terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya migrasi Bugis. Faktor tersebut adalah kondisi politik dan ekonomi. Kemudian *spirit* dari orang Bugis untuk *massompe'* ke daerah lain. Kemudian pembentukan komunitas Bugis di Linggi dan strategi adaptasi ekonominya, tidak jauh berbeda dengan upaya pembukaan daerah potensial di wilayah Tanah Bumbu yang dilakukan orang-orang Bugis.

D. Kerangka Teoritis dan Pendekatan

Kerangka konseptual adalah kerangka berpikir yang berisi penjelasan atau pengertian yang sudah dibakukan secara ilmiah dari aspek-aspek yang akan dibahas dalam tesis ini. Karena itu, dalam penelitian yang berjudul “Diaspora Suku Bugis di wilayah Tanah Bumbu, Karesidenan Borneo bagian Selatan dan Timur Tahun 1842-1942”, akan dijelaskan konsep-konsep yang dipergunakan dalam penulisan, agar tidak menimbulkan multi penafsiran.

Diaspora berasal kata benda dalam bahasa Yunani '*diaspora*' yang kemudian menjadi '*dispersion*' dalam bahasa Inggris yang bermakna leksikal pencar atau

penyebarluasan. Bentuk verba dari kata diaspora adalah '*diaspeiro*', yaitu menyebar ke luar negeri ataupun menyebar ke sekitar. Pada saat ini para ilmuwan sosial menggunakan istilah "diaspora" untuk merujuk kepada para migran yang tinggal di daerah perantauan dan melahirkan generasi-generasi baru di perantauan yang semuanya tetap menjaga hubungan kekeluargaan satu sama lain dan melakukan kunjungan berkala ke daerah asal mereka.¹⁸

Istilah diaspora pada awalnya digunakan untuk penyebaran bangsa Yahudi di dunia. Dalam perkembangannya, istilah ini dipakai untuk menggambarkan diaspora Armenia dan Yunani. Ketiga diaspora ini mempunyai identifikasi religius kuat dan suatu hubungan kejiwaan dengan daratan asal mereka yaitu Zion, Ararat dan Hellas. Bidang akademik dari studi diaspora terbentuk pada akhir abad ke-20, sehubungan dengan meluasnya arti 'diaspora'. Jacob Riis menyimpulkan bahwa diaspora baru diselidiki pada akhir abad ke-20. Penyelidikan diaspora ini dilatarbelakangi adanya krisis sehingga terjadi pengungsian etnis besar-besaran, kemudian karena peperangan dan bangkitnya nasionalisme, fasisme, komunisme dan rasisme, serta bencana alam dan krisis ekonomi. Pada paruh pertama abad ke-20, ratusan juta orang terpaksa mengungsi ke Eropa, Asia, dan Afrika Utara, hingga Benua Amerika.¹⁹

¹⁸Singgih Tri Sulistiyono, 2011, *op.cit.*, hlm.8;

¹⁹Anna Harutyunyan, "Challenging the Theory of Diaspora from the Field", *Working Papers des Sonderforschungsbereiches* 640, Nr. 1/2012, Humboldt-Universität zu Berlin, 2012, hlm. 3-5.

Paul Gilroy mengidentifikasi diaspora sebagai suatu hubungan relational, pembentukan karakter yang disebabkan penyebaran suku atau etnis secara terpaksa. Faktor pendorong diaspora adalah suatu pengaruh yang dominan, seperti perang. Karena itu diaspora kurang lebih sama untuk menggambarkan perjalanan atau *nomadism*. Hubungannya dengan faktor pendorong diaspora, tidak hanya karena perang atau desakan internal dalam suatu wilayah etnis, tetapi dalam perkembangannya banyak dari diaspora -seperti diaspora orang Turki dan Cina- berkaitan dengan alasan ekonomi, pembunuhan berencana, perbudakan serta *genocide*.²⁰ Pendapat lainnya, tidak membatasi diaspora hanyalah tempat penampungan bagi etnis yang terusir paksa. Seperti pendapat Jana Evans Braziel, diaspora adalah suatu istilah yang secara harafiah berada pada tingkatan historis, di mana suatu etnis ‘memindahkan tanah air’ mereka melalui migrasi atau mengasingkan diri sebagai konsekuensi dari perluasan koloni.²¹

Demikian halnya diungkapkan Gabriel Sheffer, diaspora adalah suatu kelompok etnis atau bangsa yang meninggalkan tanah airnya karena adanya kekerasan atau hal lainnya, dan tetap memelihara identitas kolektif mereka (bahasa, agama, budaya) dalam organisasi masyarakat di daerah tujuan migrasi. Ada beberapa bentuk diaspora. Ada yang menggolongkan diaspora berdasarkan motivasi atau faktor pendorongnya, baik berupa faktor ekonomi maupun faktor lain yang menyebabkan

²⁰Gilroy dalam Stefan Helmreich, “Kinship, Nation, and Paul Gilroy's Concept of Diaspora”, *Diaspora: A Journal of Transnational Studies*, Volume 2, Number 2, Fall 1992, hlm. 243-249.

²¹Jana Evans Braziel & Anita Mannur, *op.cit.*, hlm.4.

terjadinya diaspora. Sheffer menggolongkan diaspora atas dua kategori yakni diaspora lama atau *traditional historical* dan diaspora baru atau *new diaspora*. Diaspora lama adalah diaspora yang terjadi sebelum abad ke 21, sedangkan diaspora baru terjadi setelah abad-21.²² Dengan demikian diaspora Bugis di wilayah Tanah Bumbu dapat digolongkan sebagai diaspora lama.

Mengenai kategorisasi diaspora menurut Vertovec, diaspora menyangkut tiga hal, yaitu proses penyebaran, masyarakat yang tinggal di daerah asing, serta tempat atau ruang geografis di mana mereka tinggal atau berdiaspora. Secara Sosiologis dan Antropologis masyarakat *diasporik* mengalami pola perubahan akibat interaksi dan adaptasi dengan masyarakat lokal. Pola perubahan ini berhubungan dengan migrasi dan status minoritas yang meliputi etnis dan pluralisme agama, identitas serta perubahan lainnya. Secara lebih luas, Vertovec menjelaskan diaspora dalam tiga bentuk yakni bentuk sosial, jenis kesadaran, dan model produksi budaya.²³

Apabila dianalisa menurut pendapat Vertonec, diaspora Bugis di wilayah Tanah Bumbu dapat dikategorikan sebagai diaspora dalam bentuk sosial. Penulis menganggap diaspora Bugis di wilayah Tanah Bumbu sebagai diaspora dalam bentuk sosial karena diaspora tersebut memenuhi kriteria karakteristik diaspora yang

²²Gabriel Sheffer, *Diaspora Politics At Home Abroad* (England: Cambridge University Press, 2002), hlm.18. Lihat juga Hans van Amersfoort, "Gabriel Sheffer and the Diaspora Experience", *Diaspora: A Journal of Transnational Studies*, Volume 13, Number 2/3, 2004, hlm. 359-373.

²³Lihat Steven Vertovec, "Religion and Diaspora" dalam Peter Antes, Armin W. Geertz, Randi R. Warne (Eds.), *New Approaches to the Study of Religion*, Vol. 2 (Berlin: Walter de Gruyter, 2004), hlm. 275-297.

dikemukakan Vertonec. Pertama, diaspora Bugis terbentuk karena hubungan sosial yang direkatkan oleh ikatan sejarah dan geografi, sehingga secara umum *diaspora* dilihat sebagai akibat dari migrasi sukarela atau terpaksa dari satu lokasi, setidaknya dua wilayah, yakni Sulawesi dan Kalimantan. Kedua, orang Bugis memiliki kesadaran mempertahankan identitas kolektif yakni identitas *to-Ugi'*. Ketiga, identitas ini dibentuk oleh pengalaman sejarah orang Bugis di Tanah Bumbu. Keempat, suku bangsa Bugis di Tanah Bumbu juga menciptakan “organisasi-organisasi komunal” baru di tempat-tempat pemukiman, seperti *pongawa* dalam bidang perikanan serta “organisasi-organisasi” lainnya. Kelima, suku bangsa Bugis juga mempertahankan berbagai hubungan eksplisit dan implisit dengan kampung halaman mereka dengan membangun pelayaran dan perdagangan. Upaya orang Bugis menjaga identitasnya dalam konteks diaspora jika ditinjau dari pendapat Frances Gouda, mengacu pada “desentralisasi” ketika kelompok-kelompok agama atau bangsa tinggal di luar tanah airnya tetapi masih menjaga atau menegosiasikan identitas budaya mereka.²⁴

Sementara itu, istilah *Bugis* dalam tulisan ini, diartikan sebagai “orang dari Sulawesi Selatan”, seperti yang dikemukakan Christian Pelras. Sementara itu istilah *to-Ugi'* berasal dari Bahasa Bugis yakni *to* : orang, *Ugi'* ; Bugis, sehingga *to-Ugi'* bisa diartikan dengan *orang Bugis*. Istilah ini juga biasanya dipakai oleh orang Bugis sendiri untuk mengidentifikasi dirinya di tanah rantau sehingga bisa membedakannya

²⁴Frances Gouda, *Dutch Culture Overseas, Praktik Kolonial di Hindia Belanda 1900-1942* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 1995), hlm.16.

dengan suku lainnya. Istilah *to-Ugi'* adalah kumpulan masyarakat di wilayah Tanah Bumbu, Karesidenan Kalimantan Bagian Selatan dan Timur yang memiliki adat istiadat, budaya dan tradisi Bugis. *Ugi* adalah singkatan nama dari La Satumpugi, seorang Raja di Wajo pada abad ke-13 yang rakyatnya menyebut diri mereka sebagai *to-Ugi'*, yang berarti pengikut La Satumpugi. Selanjutnya, istilah *to-ugi* menjadi identitas komunitas yaitu suku Bugis yang tersebar di Nusantara. Dalam perkembangannya, identitas *to-Ugi'* di Tanah Bumbu mempunyai unsur yang berbeda dengan *to-Ugi'* di Wajo, Sulawesi Selatan. Perbedaan tersebut karena identitas *to-Ugi'* dibentuk di luar wilayah Sulawesi Selatan, serta perbedaan beberapa unsur budaya Bugis yang sudah mengalami proses *difusi* ke wilayah Tanah Bumbu.²⁵

Penggunaan kata *Ugi'* pada suku bangsa Bugis di Tanah Bumbu untuk menunjukkan bahwa “inilah diri orang Bugis”. Misalnya, menggunakan istilah *basa Ugi'* atau bahasa Bugis, *elong Ugi'* atau lagu Bugis, dan istilah lainnya yang menunjukkan hal tersebut adalah “hanya” milik orang Bugis. Sementara “label” yang diberikan oleh orang Bugis di Tanah Bumbu pada suku lainnya, dengan menyebut awal nama suku bersangkutan dengan tambahan kata *to* yang menunjukkan orang,

²⁵La Satumpugi yang namanya menjadi asal kata *Ugi'* adalah ayah dari We Cudai. Satumpugi bersaudara dengan Batara Lattu, ayah dari Sawerigading. We Cudai kemudian dinikahkan dengan Sawerigading dan melahirkan keturunan orang Bugis di Sulawesi Selatan, termasuk La Galigo. Fenomena penamaan *to-Ugi'* ini hampir sama dengan penamaan Suku Bajau yang berasal Kepulauan Sulu, Filipina Selatan. Suku ini merupakan suku nomaden yang hidup di atas laut, sehingga disebut gipsi laut. Suku Bajau menggunakan bahasa *Sama* sehingga sering disebut juga *sama bajau*. Penamaan suku Bajau berbeda di tiap daerah tetapi tetap menunjukkan suku yang sama, seperti *Badjau*, *Bajo* atau *Bajau Samma*. Lihat Christian Pelras, *Manusia Bugis* (Jakarta: Nalar, 2006), hlm.15.

misalnya orang Banjar disebut *to-Banjara'*, orang Dayak disebut *to-Daya'*, orang Jawa disebut *to-Jawa*, dan lain sebagainya.²⁶

Selanjutnya, pendekatan yang dipakai dalam tesis ini adalah pendekatan Antropologi. Dalam pendekatan ini, penulis berupaya untuk melakukan *reapprochement* (saling mendekatkan) antara Sejarah dengan Antropologi sehingga bisa mendukung eksplanasi sejarah. Sebagai ilmu yang “tak lengkap”, Sejarah mesti meminta bantuan dari ilmu sosial untuk melengkapi dirinya, seperti dalam tataran teoritis dan metodologis. Pendekatan Antropologi ini, diaplikasikan penulis untuk menjelaskan beberapa hal yang dibahas dalam tesis ini seperti konsep migrasi atau *mallekke' dapureng* sebagai spirit pada diri orang Bugis dan hubungan *patron-klien* Bugis atau *ajjoareng-joa'*.

Adapun teori yang diaplikasikan dalam membahas tesis ini adalah *Teori Diaspora Klasik* yang dikemukakan oleh Safran. Menurut Safran, ada enam karakteristik dari diaspora, yaitu (1) Etnis atau suku atau nenek moyang mereka meninggalkan tanah airnya karena terpaksa menuju daerah yang asing. Kemudian (2) mereka mempertahankan memori kolektif, visi atau dongeng tentang tanah tumpah darah asli mereka. Selanjutnya (3) mereka percaya bahwa tidak bisa secara penuh diterima oleh masyarakat tuan rumah dan oleh karena itu sebagian mengasingkan dan membatasi diri. Berikutnya (4) mereka menganggap tanah tumpah darah nenek moyang mereka sebagai rumah ideal untuk menjadi tempat mereka atau keturunannya akan kembali. Kemudian (5) mereka percaya bahwa mereka secara bersama merasa

²⁶*Ibid.*

terikat dengan ‘tanah air’ asli mereka. Selanjutnya (6) mereka menghubungkan dirinya dengan ‘tanah air’-nya dengan cara apapun, dan memelihara kesetiakawanan antar mereka.²⁷

Dalam teori tersebut, daerah tujuan diaspora disebut juga “negara tuan rumah”, dimana ikatan antar penduduk yakni penduduk “pendatang” dan penduduk “asli” memainkan peran penting. Kemudian penduduk yang berdiaspora tersebut memelihara hubungan antara daerah asalnya dengan daerah tujuan “diaspora”-nya sehingga terjadi “tarik-menarik” melalui memori, dan akhirnya tercipta sistem hubungan dalam suatu jaringan diaspora. Pembatasan istilah “diaspora” menurut Safran sangat diperlukan karena istilah “diaspora” -oleh beberapa ahli- sering dianggap hanya sebagai metafora dibandingkan perannya secara instrumental. Karena itulah, dalam teori-nya menurut kriteria dari Safran diaspora harus dipersempit ke dalam enam fokus yakni faktor pendorong diaspora, pemilihan daerah tujuan diaspora, identitas kesadaran, “jaringan” diaspora, durasi hubungan transnasional dan otonom daerah tujuan dan daerah asal.²⁸

²⁷ William Safran, “The Jewish Diaspora in a Comparative and Theoretical Perspective”, *Muse* Volume 10, Number 1, Spring 2005, hlm. 36-38; lihat juga Kristina Bagramyan, “Diaspora Enforced Identity: Construction of The Victim Identity in The Film Ararat” (Thesis for the Master’s Degree in Political Science, Department of Political Science, Central European University, Budapest Hungary, 2006), hlm.11-12.

²⁸ *Ibid*, lihat juga Michel Bruneau, "Diasporas, transnational spaces and communities", dalam Rainer Baubock & Thomas Faist (ed), *Diaspora and Transnationalism Concepts, Theories and Method* (Amsterdam: Amsterdam University Pres, 2010), hlm.35-39.

Menurut Safran, populasi “diasporik” (masyarakat diaspora) terbentuk karena tekanan seperti bencana kelaparan dan kemiskinan. Pemilihan daerah-daerah tujuan diaspora sesuai dengan struktur rantai migrasi yang terjadi antara dua daerah. Dalam hal ini setelah terdapat rute-rute migrasi yang memungkinkan untuk terjadinya diaspora. Kemudian populasi “diasporik” terintegrasi tetapi tidak “berasimilasi” dengan penduduk “tuan rumah”. Penduduk “diasporik” mempertahankan kesadaran identitas yang kuat karena masih mempertahankan memori tentang daerah asal dan sejarahnya. Hal ini menyiratkan adanya ikatan yang kuat dengan daerah asal atau biasa diistilahkan dengan 'komunitas imajiner'.²⁹

Kelompok-kelompok diaspora yang tersebar dalam gelombang migrasi ini melestarikan dan mengembangkan budaya-nya, kemudian memelihara hubungan interaksi antara mereka sendiri. Kelompok diaspora memelihara hubungan dengan daerah asal dengan melakukan “pertukaran” baik berupa orang, barang dari berbagai jenis, informasi, dan lain sebagainya melalui suatu jaringan. Dalam ruang jaringan tersebut bersifat non-hirarkis atau cenderung horizontal, tidak vertikal. Diaspora menjadi formasi sosial otonom antara penduduk pendatang dengan “tuan rumah”.³⁰

²⁹Lihat juga Myra A. Waterbury, “Bridging the Divide: Towards a Comparative Framework for Understanding Kin State and Migrant-Sending State Diaspora Politics” dalam Rainer Baubock & Thomas Faist (ed), *op.cit.*, hlm. 131; bandingkan dengan Rogers Brubaker, “The ‘Diaspora’ Diaspora”, *Ethnic and Racial Studies* Volume, 28 No. 1 January 2005, hlm. 1-6.

³⁰Mengenai hubungan diaspora dan identitas, lebih jelasnya lihat Stuart Hall, “Cultural Identity and Diaspora”, dalam J Rutherford (ed), *Identity* (London: Lawrence & Wishart, 1990). hlm.393 & 394.

E. Metode Penelitian

Penulisan tesis ini menggunakan metode sejarah,³¹ yakni menggunakan sekumpulan aturan sistematis dalam usaha mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikannya dalam suatu *sintesa*. Peristiwa sejarah yang akan dibahas dalam tesis ini adalah diaspora suku Bugis ke wilayah Tanah Bumbu, Karesidenan Borneo bagian Selatan dan Timur pada tahun 1842-1942. Selanjutnya langkah-langkah dalam metode sejarah tersebut dioperasionalkan dalam empat langkah penelitian.

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Heuristik adalah proses mencari untuk menemukan sumber-sumber sejarah, atau pengumpulan bahan-bahan historis atau usaha memilih suatu obyek dan mengumpulkan informasi mengenai objek tersebut.³² Berdasarkan pertimbangan bahwa peristiwa yang diteliti terjadi dalam rentang waktu yang berbeda dengan masa sekarang, sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data peninggalan masa lampau. Data-data ini sering disebut sebagai arsip atau dokumen.

³¹Helius Syamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Jakarta: Proyek Pendidikan Tenaga Akademik, 1996), hlm 1-4, Louis Gottchalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, tt), hlm. 18, Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm.1. Lihat juga Richard Marius & Melvin E Page, *A Short Guide to Writing About History* (New York: Longman), hlm.39-45.

³²Helius Syamsuddin, 1996, *loc. cit.*

Dalam penulisan tesis ini, penulis mengumpulkan informasi-informasi sejarah yang berhubungan dengan jejak-jejak diaspora Bugis yang pernah terjadi di wilayah Tanah Bumbu. Kemudian mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang berhubungan dengan fenomena diaspora Bugis tersebut yang tujuannya untuk menuliskan tentang sejarah diaspora Bugis di wilayah Tanah Bumbu, Karesidenan Borneo bagian Selatan dan Timur. Setelah ditelusuri, jejak tersebut berupa jejak material dan jejak tertulis. Sehubungan dengan itu, sumber-sumber sejarah tentang diaspora Bugis ke wilayah Tanah Bumbu, dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu primer dan sekunder.

a). Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber utama yang informasinya atau kesaksiannya diperoleh secara langsung dari orang atau alat perekam yang hadir dalam suatu peristiwa. Dalam hal ini, adalah sumber yang berhubungan dengan diaspora Bugis. Sumber primer tersebut penulis peroleh dari riset arsip yang meliputi dokumen-dokumen tertulis yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Adapun sumber primer yang diteliti adalah arsip-arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berupa arsip *Algemene Secretarie (AS)*, *Binnenlandsch Bestur (BB)*, *Memorie van Overgave (MvO)*, *Koloniaal Verslag (KV)*, *Regerings Almanak (RA)*, *Staatsblad van Nederlandsch Indie (Stb)*, arsip ANRI bundel *Borneo Zuid en Oosterafdeeling (BZO)*, arsip *Surat-Surat Perjanjian Antara Kesultanan Banjarmasin Dengan Pemerintahan VOC, Bataafsche Republik, Inggris dan Hindia Belanda 1635 – 1860*, arsip Kontrak Perjanjian, Laporan Politik dan *Dagregister*

(Catatan Harian). Sementara koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), diantaranya adalah *volkstelling* (sensus penduduk) tahun 1930.

Sumber primer lainnya adalah naskah-naskah lokal koleksi keturunan raja Pagatan terakhir Andi Satria Jaya, seperti naskah *Lontara Kapitan La Mattone* (LKLM) yang ditulis oleh La Mattone pada 21 Agustus 1868 dan *Lontara Sukku'na Wajo* (LSW), yang ditulis oleh La Sangaji Puanna La Sengngeng, *Arung Bettempola Wajo'* pada tahun 1764-1767. Selanjutnya arsip-arsip daerah Kalimantan Selatan pada masa kolonial, koleksi Perpustakaan dan Arsip Daerah Kalimantan Selatan, seperti *Staatsblad van Nederlandisch Indie Voor Het Jaar 1849*, kemudian tulisan C.M. Schwaner, *Historische, Geograpische en Statistieke Aanteekeningen Betreffende Tanah Boemboe* tahun 1855, tulisan J.J. Hollander, *Borneo's Zuider en Ooster Afdeeling* tahun 1864 serta arsip kolonial lainnya.

Informasi tentang peristiwa sejarah yang terkandung di dalam arsip tersebut lebih bersifat logis (masuk akal) dan menekankan pada peristiwa tertentu dan catatan tentang suatu hal yang sifatnya institusional atau kelembagaan. Pada umumnya, arsip yang berbentuk dokumen itu memang tidak pernah dengan sengaja diciptakan untuk kepentingan penelitian sejarah melainkan digunakan untuk kepentingan administrasi pemerintah, organisasi ataupun pihak swasta. Bahan arsip di Indonesia, pada umumnya adalah berupa otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian,

memoir, surat kabar dan dokumen-dokumen pemerintah.³³ Walaupun sumber yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah arsip kolonial, tapi terlepas dari segala kelemahan dan sudut pandang yang *Eropasentris*, bukan berarti yang dicatat di dalamnya hanya kepentingan kolonial saja. Keberadaan arsip kolonial (*Algemeen Verslag/AV*) tersebut, cukup membantu memberikan gambaran dan sejumlah informasi tentang diaspora orang Bugis dan perkembangannya abad ke-19 hingga abad ke-20.

b). Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan hasil penelitian atau penulisan ulang dari sumber pertama.³⁴ Sumber sekunder ini berupa informasi yang diberikan oleh orang yang tidak langsung mengamati atau orang yang tidak langsung terlibat dalam suatu kejadian, keadaan tertentu atau tidak langsung mengamati objek tertentu. Sumber tersebut penulis kumpulkan berupa sebagian besar buku yang telah diterbitkan, majalah ataupun surat kabar yang dapat mendukung pembahasan topik yang dibahas penulis yakni diaspora suku Bugis. Sumber sumber sekunder misalnya artikel *Sedjarah Raja Raja Tanah Boemboe* dalam majalah *Mandau* terbitan tahun 1930, koleksi Andi Satria Jaya, keturunan raja Pagatan terakhir. Kemudian kumpulan

³³Lihat Sartono Kartodirdjo, “Metode Menggunakan Bahan Dokumen”, dalam Koentjaraningrat (ed), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 62-92.

³⁴Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996), hlm. 101.

tulisan tentang diaspora Bugis dalam buku *Diaspora Bugis di Alam Melayu Nusantara*, serta buku-buku tentang diaspora Bugis lainnya.

Penulis juga menggunakan sumber-sumber sejarah lisan, dengan melakukan metode wawancara. Wawancara dilakukan dengan narasumber keturunan Raja/Arung Pagatan terakhir, Andi Satria Jaya. Info yang diperoleh dari wawancara ini berhubungan dengan asal-mula Suku Bugis membuka wilayah Pagatan, perkembangan komunitas dan adat-budaya Bugis Pagatan yang masih dipelihara secara turun-temurun sampai sekarang. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa pemuka masyarakat Pagatan yang tergabung dalam Lembaga Ade Ugi' Pagatan (LAUP), seperti Andi Tadjudin, M. Koding (Zainuddin), Abdul Kadir Wellang, Abdul Rahim Gani, Muhammad Sindong, Usman Lundrung, Bustani Azhar dan M. Kasran Hamid. Melalui wawancara dengan pemuka adat Bugis, diperoleh informasi yang berhubungan dengan sejarah dan adat-budaya Bugis Pagatan di wilayah Pagatan khususnya dan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu pada umumnya. Selanjutnya wawancara juga dilakukan dengan pengamat budaya Bugis Pagatan, Faisal Batennie. Informasi yang digali adalah mengenai sektor perikanan di Pagatan yang berkembang pada tahun 1900 sampai tahun 1942-an.

2. Kritik Sumber

Kritik sumber yaitu penilaian atau pengujian terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Dalam tahap ini penulis melakukan dua jenis kritik, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik intern yang dilakukan menyangkut penilaian isi sumber

tersebut untuk mendapatkan kredibilitas sumber. Sementara itu, kritik ekstern yang dilakukan menyangkut keaslian (otentisitas) sumber, apakah sumber itu adalah sumber asli atau palsu.

Kritik intern dilakukan dengan menguji isi sumber, yakni mencari relevansi isi sumber sejarah tersebut dengan analisis komparatif beberapa sumber.³⁵ Selanjutnya memeriksa isi sumber, apakah sumber itu layak dipercaya untuk dijadikan sumber informasi. Sementara itu kritik ekstern, dilakukan dengan pengujian atas fisik sumber. Pada tahap ini, penulis melakukan pengecekan berkaitan dengan keaslian sumber, apakah sumber dibuat pada zaman yang sama dengan yang dipaparkannya. Kemudian memeriksa pembuat sumber, yaitu apakah sumber dibuat oleh orang yang berwenang atau terlibat langsung atau sebagai saksi langsung peristiwa. Selanjutnya menyangkut masalah kelengkapan sumber, yaitu apakah sumber itu memiliki lampiran-lampiran penjelasan atau tidak.

Kadangkala pada beberapa sumber yang penulis pergunakan, baik sumber lokal maupun kolonial, terdapat angka tahun yang berbeda tentang suatu peristiwa yang sama sehingga perlu dikritisi, mana yang mendekati kebenaran. Misalnya, terdapat tiga versi berbeda mengenai periode kapan didirikannya kerajaan Pagatan. Versi pertama, menurut catatan Eisenberger, Pagatan dibangun oleh orang Bugis pada tahun 1750. Kemudian versi yang kedua, menurut C. Nagtegaal, tidak menentukan tahun yang pasti, hanya menyebutkan bahwa Pagatan dibangun pada pertengahan

³⁵ Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman)* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1978), hlm. 38.

abad 18 oleh seorang pedagang Bugis dari Wadjo (Zuid West Celebes) bernama Poewana Deka atas izin Sultan Banjarmasin. Sementara itu, dalam naskah lokal *Lontara Kapitan La Mattone* yang ditulis La Mattone tahun 1868, menyebutkan Pedagang Bugis dari Wajo Sulawesi Selatan tiba di Pagatan pada tahun 1734 yang dipimpin oleh Puanna Dekke. Contoh lainnya adalah perbedaan versi tentang tokoh pendiri Kerajaan Pagatan. Menurut Assegaf dalam tulisannya, *Sejarah Kerajaan Sadurangas atau Kerajaan Pasir*, pendiri kerajaan Pagatan adalah Arung Turawe. Sementara itu, sumber lainnya seperti tulisan Eisenberger, Nagtegaal serta naskah lokal *Lontara Kapitan La Mattone* menyebutkan bahwa pendiri kerajaan Pagatan adalah Puanna Dekke dari Wajo. Perbedaan versi ini tentunya membutuhkan kritik sehingga diperoleh fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Setelah dikritik maka sumber tersebut dapat dikatakan sah, dan dapat digunakan dalam menulis tentang diaspora suku Bugis ke wilayah Tanah Bumbu, Karesidenan Borneo bagian Selatan dan Timur tahun 1842-1942.

3. Interpretasi

Setelah melakukan kritik terhadap berbagai sumber maka penulis menghimpun informasi-informasi suatu periode sejarah yang diteliti. Berdasarkan keterangan itu dapat disusun fakta-fakta sejarah kemudian fakta-fakta tersebut diseleksi, disusun, dianalisis dan disintesis dalam urutan yang kronologis dalam konteks hubungan kausalitas. Dalam hal ini, penulis melakukan penafsiran terhadap fakta-fakta yang telah diperoleh melalui kritik sumber, yaitu dengan cara mencari dan menyusun

hubungan antar fakta-fakta yang sama dan sejenis, kemudian disusun secara kronologis dan dalam hubungan sebab akibat. Tujuannya, memperoleh pemahaman mengenai masalah diaspora Bugis ke wilayah Tanah Bumbu.

4. Historiografi

Historiografi merupakan suatu proses tahapan penelitian sejarah yang berkenaan dengan penulisan sejarah secara deskriptif analitis berdasarkan sistematika dan kronologi. Menulis sejarah merupakan suatu kegiatan intelektual dan ini merupakan suatu cara yang utama untuk memahami sejarah. Rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan sumber yang diperoleh dengan menempuh proses itu disebut *historiografi* atau penulisan sejarah.³⁶ Dalam tahap ini, penulis melakukan kegiatan menyajikan, mengisahkan atau menuliskan hasil penelitian menjadi tulisan atau karya sejarah. Tentunya, kemampuan imajinasi dan seni menulis sangat diperlukan dan menentukan hasil akhir penelitian. Oleh karena itu penulis berusaha menggunakan bahasa baku, baik dan benar sehingga mudah dimengerti oleh pembaca dan tidak menimbulkan kesalahpahaman penafsiran.

³⁶R. Moh. Ali, *Penentuan Arti Sedjarah dan Pengaruhnja dalam Metodologi Sedjarah Indonesia* (Djakarta: Bhratara, 1966), hlm. 10.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 6 (enam) bab sebagai berikut,

Bab pertama sebagai pendahuluan memuat: (1) Latar belakang dan permasalahan yang berisi uraian secara garis besar mengapa terjadi diaspora Bugis ke daerah lain, kontinuitas dan dinamika diaspora Bugis, alasan pemilihan tema penelitian serta rumusan masalah penelitian. (2) Ruang lingkup, yaitu batasan permasalahan yang akan dibahas atau dianalisis dalam penulisan tesis. Batasan ini terbagi dalam tiga ruang lingkup, yakni lingkup spasial, temporal dan keilmuan. (3) Tinjauan pustaka yang mengacu pada beberapa literatur utama yang dipergunakan dalam membahas diaspora Bugis ke wilayah Tanah Bumbu. (4) Kerangka teoritis dan pendekatan, berhubungan dengan pengertian konsep, pendekatan dan teori yang dipakai dalam pembahasan tesis. (5) Metode penelitian, yaitu metode sejarah dengan langkah langkahnya yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. (6) Sistematika penulisan yang berisi urutan dalam pembahasan tesis.

Pada bab II, diuraikan kondisi wilayah Tanah Bumbu pada pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Bab ini memuat: (1) Kondisi geografis Tanah Bumbu serta daerah-daerah di wilayah ini yakni Pagatan, Kusan, Batulicin, Cantung, Bangkalan, Sampanahan, Manunggal, Cengal, Sebanan dan Pulau Laut. (2) Kondisi demografis dan ekonomi yang berhubungan dengan rincian jumlah penduduk dan perekonomiannya di wilayah Tanah Bumbu. (3) Struktur masyarakat yang berhubungan dengan stratifikasi sosial pada masyarakat Bugis. (4) Struktur

pemerintahan sipil, yaitu pengaturan birokrasi pemerintahan dari masa kerajaan hingga masa Hindia Belanda.

Dalam bab III, dijelaskan diaspora awal suku Bugis ke wilayah Tanah Bumbu, tahun 1842-1900. Dalam bab ini memuat: (1) Spirit *massompe* dan diaspora Bugis ke Tanah Bumbu awal abad ke-19. (2) Dinamika Jaringan Diaspora La Madukelleng Tahun 1842-1878. Dalam pembahasan, dijelaskan tentang dinamika jaringan *to-Ugi* di wilayah Tanah Bumbu. (3) Konflik, relasi kuasa dan budaya masyarakat lokal tahun 1842-1900. (4) Dinamika Kerajaan Bugis Pagatan, terutama penetrasi Belanda dan kemapanan pemerintahan *to-Ugi* hingga tahun 1900-an.

Pada bab IV, dibahas tentang perkembangan diaspora Bugis dan “kemapanan” identitas *to-Ugi* di wilayah Tanah Bumbu tahun 1900-1920. Dalam bab ini memuat: (1) Pandangan orang Bugis terhadap diaspora dalam perspektif filosofis. Kemudian (2) Gelombang migrasi *mallekke dapureng* ke Kalimantan awal abad ke-20. (3) Peranan *Pambakala Kampoeng Bugis* dalam pemilikan tanah dan pengumpulan pajak di wilayah Tanah Bumbu. (4) Migrasi musiman *Pappagattang* dan munculnya identitas maritim *to-Ugi* di Tanah Bumbu tahun 1900-1930. Dalam hal ini berhubungan dengan munculnya upacara *Mappanretasi* dan “industri” pembuatan perahu di Kampung Pejala dan Pakkaja. (5) Pertambangan batubara Pulau Laut dan pengaruhnya bagi migran Bugis di Tanah Bumbu.

Pada bab V dibahas tentang jaringan ekonomi *to-Ugi* pada masa akhir kekuasaan kolonial Belanda tahun 1930-1942. Bab ini memuat: (1) Intensitas migrasi Bugis ke Borneo tahun 1930 (2) Perkembangan jaringan ekonomi *pongawa* Bugis

yang masih tetap eksis di tengah depresi ekonomi. Pada bab ini juga membahas bagaimana *pongawa* Bugis membangun usaha perikanan. Kemudian pola pertanian *bahuma* serta membuat kopra yang menjadi strategi adaptasi ekonomi migran Bugis. Selanjutnya, membahas tentang *ajjoareng-joa'* sebagai model hubungan *patron-klien* migran Bugis. (3) Peranan armada perahu layar Bugis dan Koninklijk Paketvaart Maatshappij (KPM) dalam menjaga hubungan antara orang Bugis di Tanah Bumbu dengan daerah asalnya di Sulawesi selatan.

Terakhir, pada bab VI diuraikan tentang kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dalam tesis.